

# **KONTRIBUSI PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**Mustika Nur Alam - Renny Oktafia**

Perbankan Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

**Abstrak** : Dalam sebuah kontribusi, pada proses pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Karakteristik perbankan syariah berbeda dengan perbankan yang berdasarkan system bunga, karena perbankan syariah didasarkan pada core product pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *musharakah* dan *mudharabah*. Dengan demikian, kehadiran perbankan Syariah seharusnya memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan suatu perekonomian terhadap sector rill. Salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sector rill adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dalam perekonomian nasional saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan domestic bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi.

**Kata Kunci** : *Pembiayaan di era perbankan syariah, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)*

## **Pendahuluan**

Perbankan merupakan suatu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki agen pembangunan (agent of development) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai Lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), yaitu suatu lembaga yang bertugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi perbankan salah satunya sebagai Lembaga intermediasi keuangan dan sebagai permodalan dalam membantu warga masyarakat dalam hal perdagangan atau wiraswasta.

Dalam eksistensi perbankan Syariah di Indonesia terjadi perkembangan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan Syariah. Kehadiran Undang-Undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari Perbankan Syariah dan membedakannya dengan system perbankan konvensional. (Hidayanto, 2003)

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank Syariah

adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsipnya. Berdasarkan jenisnya, bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank Syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musharakah*), jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*mudharabah*), sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa istina'*), akad salam, akad istina', sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntahiya bin tamlik*), dan prinsip-prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>1</sup>

Dapat kita lihat ruang lingkup kegiatan usaha dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk bank konvensional. Hal ini memungkinkan produk bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan dan nasabah deposan maupun debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skema pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Sementara di Indonesia sektor ekonomi sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi, sektor ekonomi tersebut mampu bertahan. Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. (Hidayanto, 2003)

---

<sup>1</sup>Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan. Sektor UMKM, permodalan tersebut mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari bank. Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang sangat tinggi dan diharuskan adanya jaminan kebendaan (collateral minded) dalam memperoleh kredit yang sulit dipenuhi. Pemberian fasilitas kredit sebagai aktivitas utama lembaga perbankan pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu. Namun dalam perkembangan saat ini mengarah pada variasi dan pola-pola yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar dan regulasi yang menyertainya. Jika dilihat dari segi pola dan penggolongan kredit, maka salah satu produk perbankan dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat adalah melalui UMKM.

Dalam tatanan pembangunan nasional, UMKM adalah bagian integral dunia usaha berupa kegiatan ekonomi rakyat yang kedudukan, potensi, dan perannya sangat strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu maka UMKM ini perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara tegas telah adanya pendefinisian pemisahan klasifikasi usaha. Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: Pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang undang. Kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang

berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Hidayanto, 2003)

Berdasarkan prinsip dasar produk tersebut maka bank syariah sesungguhnya memiliki core product pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan musharakah dan mudharabah. Kehadiran bank syariah seharusnya memberikan dampak yang baik dan luar biasa terhadap pertumbuhan sektor riil khususnya UMKM. Hal ini dikarenakan pola mudharabah dan musharakah merupakan pola investasi langsung pada sektor riil dan return pada sektor keuangan (bagi hasil). Dengan demikian, keberadaan bank syariah harus mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Fungsi tersebut akan terwujud apabila bank syariah menggunakan akad profit and loss sharing (mudharabah dan musharakah) sebagai core product-nya.

## **Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia**

Pada awalnya terjadi penurunan kondisi perekonomian di Indonesia. Hal ini berdampak buruk bagi semua kalangan, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan juga banyaknya pengangguran akibat banyak perusahaan yang tutup karena bangkrut. Banyak faktor yang menyebabkan penurunan perekonomian, salah satunya adalah krisis moneter yang terjadi pada 1997. Dengan terjadinya penurunan perekonomian ini telah menyadarkan beberapa pihak seperti pemerintah, Bank Indonesia, DPR dan usaha lainnya untuk menggunakan sistem syariah sebagai jalan atau solusi alternative. Sebagai contohnya ialah pemerintah menerapkan sistem usaha dagang untuk rakyat kecil, karena diharapkan dengan berwiraswasta akan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Maka dalam hal ini, perlu adanya solusi alternative permodalan untuk pelaku usaha mikro kecil, menengah atau tingkat atas dengan jalan pengajuan permodalan kepada pihak perbankan atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) juga dapat dijadikan solusi dalam hal permodalan warga negara (Oktafia, 2017).

Pada mulanya sebuah Lembaga Keuangan Syariah saat ini sudah tersebar diberbagai wilayah di Indonesia. Suatu Lembaga keuangan syariah ini sangatlah berkomitmen pada ajaran agama islam. Dalam hal ini, suatu Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah lebih banyak kemaslahannya daripada mudharatnya. Dengan didirikan suatu Lembaga Keuangan Syariah ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kesadaran pada diri kita untuk menerapkan ajaran islam yang utuh tanpa adanya suatu penyimpanan apapun. Oleh karena itu, dari pihak warga masyarakat lebih dituntut untuk memilih Lembaga Keuangan Syariah daripada Lembaga Keuangan Konvensionalnya dalam proses menabung uang. Dengan

kehadiran Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat.

Dalam sistem lembaga keuangan syariah ini terdapat pembiayaan murabahah, simpanan amanah, tabungan atau deposito wadiah (titipan) serta pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Selain itu juga terdapat asuransi syariahnya. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sangatlah berkembang pesat seperti halnya yaitu suatu Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia.

Secara sistem sesungguhnya Lembaga Keuangan Syariah lebih unggul daripada konvensional. Karena Lembaga Keuangan Syariah dalam hal penyimpanan dana akan disimpan secara kolektif dan dipergunakan untuk sektor-sektor yang halal dan thayib serta sistem pada suatu lembaga keuangan syariah itu biasanya menggunakan sistem bagi hasil tanpa disertai adanya riba'. Sedangkan suatu Lembaga Keuangan Konvensional hingga sekarang masih terdapat riba', dimana dalam ajaran agama islam sudah dijelaskan bahwasanya riba' itu hukumnya haram apabila dilakukan dan harus kita tinggalkan.

Selain itu juga terdapat suatu Lembaga Mikro Syariah. Dimana suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini sangatlah membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan warga (tingkat kemiskinan) melalui pemberdayaan ekonomi. Dalam lembaga ini dikembangkan di wilayah Indonesia untuk memperkuat perekonomian rakyat Indonesia melalui pembiayaan mikro. Serta dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Oktafia, 2017).

## **Pendekatan dan Perubahan Perbankan Syariah**

Menjelaskan sifat, mengkaji proses pembangunan serta faktor-faktor apa yang terkait merupakan salah satu tugas teori pembangunan. Kontribusi Islam yaitu menjadikan hidup dan ikhtiar sangat bernilai dan bermakna bagi kehidupan manusia. Pembangunan ekonomi Islam berdasarkan kerangka nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini adalah merupakan titik rujukan kita yang paling dasar. Berbagai negara Islam, dari berbagai latar belakang sedang menjalankan langkah reformasi untuk menjalankan sistem perbankan syariah berdasarkan ajaran Islam. Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim saat ini adalah bagaimana mendisain dan menjalankan secara berkelanjutan sistem perbankan dan keuangan yang sejalan dengan hakekat ideologi Islam, penghapusan riba, dan membantu mewujudkan tujuan sosial ekonomi Islam. (Adiwarman A. Karim, 2004)

Indonesia memiliki lembaga keuangan syariah yang tersebar diberbagai wilayah nusantara. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) jumlahnya makin bertambah seiring perkembangan waktu dan kebutuhan masyarakat. Pada kondisi saat ini, keuangan mikro menjadi salah satu pendekatan untuk menyelesaikan masalah-masalah pengentasan kemiskinan yang terjadi saat ini dengan melakukan pemberdayaan ekonomi dengan cara melakukan penyaluran sebagai kegiatan ekonomi produktif. Esensi dari keuangan mikro yaitu menyediakan layanan jasa keuangan untuk masyarakat dengan nominal yang kecil untuk kelangsungan usaha yang didirikannya.

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua fungsi yang melekat, yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis. Dengan potensi fungsi



lembaga keuangan mikro yang sangat besar ini, dapat dikembangkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembiayaan mikro. Dengan demikian, dapat membantu pemerintah pula dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.(Oktafia, 2017)

Ada faktor lain yang harus diperhatikan dalam mengelola lembaga keuangan mikro syariah yakni sistem pengoperasian yang digunakan pada lembaga tersebut. Dalam pengoperasiannya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) lebih banyak mengarah pada komersialisasi. Kondisi ini terjadi karena sumber pendanaan terbesar berasal dari dana komersial milik masyarakat. Jika hal ini terus melatarbelakangi maka tujuan dari diadakannya lembaga keuangan mikro untuk pengentasan kemiskinan tidak akan terealisasi.

Tujuan diadakannya Lembaga Keuangan Mikro Islam yaitu untuk memperkuat ekonomi umat Islam, dengan mengembangkan program yang mendukung pengusaha kecil. Keberlangsungan lembaga keuangan mikro Islam ini, tentu membutuhkan peran pemerintah dalam membuat sistem regulasi. Dengan sistem regulasi yang berpihak kepada lembaga keuangan mikro Islam, maka akan memperkuat lembaga ini sehingga menjadi lembaga yang sehat dan mandiri.(Oktafia, 2017)

Pada wilayah Jawa Timur kondisi perekonomian sudah mulai membaik. Kebijakan-kebijakan pemerintah Jawa Timur juga cukup berpihak dalam peningkatan perekonomian rakyat. Maka ini akan membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan bisnisnya. Namun upaya peningkatan bisnis yang akan dicapai tentu tidak mudah dan pasti

menemui kendala yaitu permodalan seperti akan menambah pengajuan administrasi tambahan modal kepada pihak perbankan yang cenderung sulit, jadi usaha UMKM disebut tidak bankable. Maka dari itu adanya LMKS adalah cara penyelesaian masalah alternatif yang dapat UMKM tempuh untuk mendapatkan permodalan.

## **KESIMPULAN**

Di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), saat ini dianggap sebagai yang efektif dalam mengatasi kemiskinan. Maka saat ini UMKM dikelompokkan sebagai pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi kutup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisor pertumbuhan. Selain menjadi sector usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja

yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam maupun luar negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

### **Daftar Pustaka**

Oktafia, R. (2017). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah ( Umkm ) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ( Lkms ) Di Jawa Timur, (110), 85-92.

Adiwarman A. Karim, 2004, Bank Islam: Analisa Fikih dan Keuangan

Hidayanto, M. F. (2003). Lembaga Keuangan Syariah dan Arbitrase Muamalat Indonesia, 6, 1 of 21.